



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, menjamin keberlanjutan usaha kecil menengah dan meningkatkan kondisi fisik lingkungan bagi keluarga miskin (daerah kumuh) di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya;
 - b. bahwa guna lebih memberdayakan usaha kecil dan menengah dan keluarga miskin (daerah kumuh) di Kota Surabaya agar turut terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 77);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang selanjutnya disingkat RSDK adalah program refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan masyarakat atau seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan kampung yang kondisi fisik lingkungannya masih memerlukan perbaikan.

6. Unit Pembinaan Keluarga Miskin, yang selanjutnya disingkat UPKM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan setempat melalui musyawarah pemangku kepentingan yang ada, untuk melaksanakan tugas pembinaan keluarga miskin, khususnya pada kegiatan program RSDK.

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Program RSDK Kota Surabaya dijabarkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Program RSDK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal 4

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, masyarakat dan UPKM serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Program RSDK Kota Surabaya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Mei 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 33 TAHUN 2011
TANGGAL : 3 MEI 2011

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH KOTA SURABAYA

1. UMUM

1.1. Pengertian :

- a. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, yang selanjutnya disingkat RSDK adalah program refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan masyarakat atau seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan kampung yang kondisi fisik lingkungannya masih memerlukan perbaikan.
- b. Unit Pembinaan Keluarga Miskin, yang selanjutnya disingkat UPKM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan setempat melalui musyawarah pemangku kepentingan yang ada, untuk melaksanakan tugas pembinaan keluarga miskin, khususnya pada kegiatan program RSDK.
- c. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disingkat KUBE adalah gabungan perorangan atau keluarga yang menjalankan kegiatan bersama, baik usaha ekonomi dan/atau sosial guna meningkatkan kesejahteraannya.
- d. Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung, yang selanjutnya disingkat KRKK adalah hasil musyawarah masyarakat yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan setempat mengenai rencana kegiatan pembangunan fisik dan/atau non fisik di wilayah kelurahan setempat, untuk mendukung implementasi program RSDK.
- e. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang memiliki Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau memiliki surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh Lurah.
- f. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
- g. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
- i. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya dapat disingkat LKMK adalah sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

- j. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan Keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri.
- k. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.

1.2. Latar belakang

Program RSDK Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Program RSDK dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up* dimana pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program ini. Keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan Program RSDK di kota Surabaya merupakan salah satu upaya meningkatkan kondisi permukiman dan sosial masyarakat di kota Surabaya, di mana penanganannya dilakukan secara terpadu baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

RSDK merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan masyarakat atau seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan kampung yang kondisi fisik lingkungannya masih memerlukan perbaikan.

RSDK, diimplementasikan dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

1.3. Visi dan misi program RSDK

Visi program RSDK Kota Surabaya adalah KEMISKINAN BUKAN HALANGAN UNTUK MAJU DAN MANDIRI.

Sedangkan misi program adalah :

- a. pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia berupa penguatan lembaga pengelola kegiatan di masyarakat, yaitu meningkatnya kemampuan dan pengetahuan bagi lembaga di tingkat masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembinaan untuk keluarga miskin serta terbinanya kualitas sumber daya manusia keluarga miskin, baik secara individu maupun kelompok.
- b. pengembangan usaha kecil, yaitu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil guna membuka peluang bagi para keluarga miskin dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, baik secara ekonomi maupun sosial.
- c. perbaikan rumah dan lingkungan, yaitu terbinanya kondisi kualitas hunian keluarga miskin baik pada bangunan rumah tinggal maupun lingkungannya, guna mendukung pengembangan kehidupan sosial ekonominya.

1.4. Pola dan prinsip pelaksanaan program RSDK

Pelaksanaan Program RSDK di kota Surabaya dilakukan dengan pola tridaya, yaitu :

- a. daya manusia (pengembangan sumber daya manusia);
- b. daya usaha (pengembangan usaha kecil dan menengah);
- c. daya lingkungan (peningkatan kondisi fisik rumah dan lingkungannya).

Dalam pelaksanaannya program RSDK di kota Surabaya harus menerapkan beberapa prinsip dasar, agar pelaksanaan program bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keluarga miskin di kota Surabaya, yaitu :

- a. akseptabel, artinya seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pelaku sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak;
- b. transparan, artinya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan program;
- c. akuntabel, artinya dalam setiap penyelenggaraan program harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. keterpaduan, artinya dalam penyelenggaraan program harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- e. kemitraan, artinya dalam pelaksanaan program diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial;
- f. keberlanjutan, artinya dalam menyelenggarakan program dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian;
- g. kesetiakawanan, artinya dalam penyelenggaraan program harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang;
- h. keadilan, artinya dalam penyelenggaraan program harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- i. kemanfaatan, artinya dalam penyelenggaraan program harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara;
- j. partisipasi, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan program harus melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- k. profesionalitas, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan program kepada masyarakat dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

1.5. Tujuan program

Tujuan kegiatan RSDK di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- c. pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- d. meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga.

2. BENTUK PROGRAM

Komponen utama program RSDK yang diimplementasikan di lingkungan perumahan kampung terdiri dari :

- a. penyiapan kelembagaan dan program di masyarakat;
- b. pelatihan keterampilan usaha;
- c. perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni;
- d. pembekalan keberlanjutan program dan kemandirian warga.

2.1. Kegiatan Penyiapan Kelembagaan

Untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial pada masing-masing kampung dilakukan penyiapan suatu lembaga lokal yaitu UPKM, baik berupa penguatan terhadap lembaga yang ada atau pembentukan lembaga baru. Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada warga (melalui forum musyawarah Rukun Warga) dan kepada Pemerintah Daerah (melalui Kelurahan dan Dinas Sosial) mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kegiatan dan dana secara berkelanjutan. Pola pembentukan kelembagaan lokal harus berdasarkan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat (bottom up).

Untuk menunjang kelancaran kegiatan kerja, UPKM mendapatkan bantuan stimulan peralatan kerja dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, sesuai dengan ketersediaan anggaran.

2.2. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Usaha

Untuk mendorong munculnya kemandirian keluarga dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan keterampilan usaha yang bisa digunakan sebagai modal guna menumbuhkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan keluarga. Pelatihan Usaha diberikan kepada keluarga miskin anggota KUBE, yang memiliki minat untuk memulai atau mengembangkan usaha. Jenis pelatihan yang diberikan, pada prinsipnya memperhatikan minat, potensi dan kemampuan keluarga dan/atau masyarakat setempat. Pembimbingan usaha kepada keluarga miskin dan/atau KUBE secara awal dilakukan oleh UPKM dan dapat dibantu oleh institusi dunia usaha yang terkait.

Secara bertahap diharapkan muncul pembinaan berkelanjutan dalam kemasam yang bersifat profesional yang diberikan oleh Instansi Pemerintah maupun swasta yang bergerak di dunia usaha dan industri. Untuk menunjang kelancaran upaya penumbuhan kegiatan usaha, kelompok keluarga miskin peserta pelatihan mendapatkan bantuan stimulan peralatan kerja dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, sesuai dengan ketersediaan anggaran.

2.3. Kegiatan Perbaikan lingkungan dan bangunan Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, bukan semata-mata kegiatan yang berorientasi fisik, melainkan merupakan satu kesatuan penanganan dengan aspek sosial ekonomi yang berorientasi pada kerangka pemberdayaan masyarakat dan keluarga.

Kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni, diberikan kepada keluarga miskin yang prasarana lingkungan dan/atau bangunan rumahnya mendapatkan prioritas untuk segera diperbaiki, dengan memperhatikan kondisi fisik rumah, gangguan yang dialami keluarga akibat kondisi rumah yang tidak layak huni dan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Jenis komponen bangunan rumah yang diperbaiki, terdiri dari :

- a. perbaikan atap;
- b. perbaikan dinding;
- c. perbaikan lantai;
- d. perbaikan komponen bangunan rumah lainnya.

Jenis perbaikan lingkungan yang dapat dilakukan adalah prasarana lingkungan dasar, seperti jalan lingkungan, saluran kecil.

2.4. Pembekalan keberlanjutan program dan kemandirian warga

Pembekalan kepada warga khususnya kelompok sasaran diberikan agar keberlanjutan program dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Bentuk pembekalan tersebut, diantaranya adalah dalam bentuk lokakarya pembekalan teknis, lokakarya pola pertanggungjawaban dan penyiapan pengguliran kegiatan, forum pertemuan komunikasi antar UPKM serta fasilitasi dan pembinaan akses pengembangan kegiatan masyarakat dengan institusi eksternal mitra Pemerintah Daerah, khususnya dari dunia usaha dan industri.

3. LOKASI DAN SASARAN PENERIMA PROGRAM

3.1. Lokasi implementasi program

Lokasi implementasi Program RSDK adalah kelurahan-kelurahan terpilih yang ada di kota Surabaya, berdasarkan hasil survey dan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

3.2. Kriteria dan syarat penerima program

Kelompok sasaran (target group) program adalah warga kampung dengan kategori keluarga miskin di mana penyusunan rencana kegiatan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarahkan oleh warga/masyarakat kampung itu sendiri.

Kriteria penerima program :

- a. keluarga dikategorikan sebagai keluarga miskin;
- b. kepala keluarga merupakan penduduk kota Surabaya;
- c. kepala keluarga berusia produktif antara 18 (delapan belas) tahun sampai 55 (lima puluh lima) tahun;
- d. kondisi rumahnya tidak layak huni;
- e. isteri atau suami atau anggota keluarga yang tinggal serumah, bersedia untuk mengikuti pelatihan dan mengembangkan usaha sesuai dengan pelatihan;
- f. bersedia mengembalikan dana pinjaman kepada pelaksana program di tingkat kelurahan (UPKM);
- g. tanah dan rumah tidak dalam sengketa/bermasalah;
- h. mendapatkan rekomendasi dari RT dan RW setempat.

Untuk keperluan validitas seleksi sasaran, pemenuhan kriteria tersebut di atas harus didukung dengan kelengkapan administrasi, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, identitas atau surat keterangan miskin.

Penajaman sasaran dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria tambahan baik dari aspek teknis, yaitu obyek yang akan ditangani/dibiayai sesuai dengan persyaratan pada tiap komponen program, misal kondisi bangunan, lingkungan, dan aspek non teknis.

3.3. Target jumlah sasaran

Target jumlah sasaran pada setiap kelurahan disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik yang untuk penguatan kelembagaan, sasaran penerima pelatihan usaha, penerima kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, maupun prasarana lingkungan.

4. PEMBIAYAAN PROGRAM

4.1. Sumber pembiayaan program

Pembiayaan implementasi program RSDK Kota Surabaya menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial.

Untuk memberi kesempatan pada peran serta warga masyarakat dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan maka mobilisasi dana swadaya masyarakat dimungkinkan dilakukan secara koordinatif dengan pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan.

4.2. Alokasi dan Pemanfaatan Dana untuk tiap Kelurahan

Secara umum kegiatan program RSDK Kota Surabaya, terdiri dari kegiatan pelatihan usaha dan kegiatan perbaikan rumah, untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dan keberlanjutan program RSDK, dilaksanakan pula kegiatan pembentukan dan/atau penguatan lembaga UPKM dengan uraian sebagai berikut :

- a. kegiatan pelatihan usaha.
Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama dan tiap peserta atau kelompok akan mendapatkan stimulan kelengkapan usaha, bukan dana modal usaha. Pelatihan yang diberikan kepada warga adalah pelatihan yang sesuai dengan minat usahanya atau kegiatan usaha yang cocok untuk dikembangkan di wilayah setempat.
- b. kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah.
Nilai dana program yang diimplementasikan untuk kegiatan perbaikan lingkungan dan bangunan rumah, disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial.
- c. kegiatan pembentukan dan/atau penguatan UPKM.
pada kegiatan pembentukan dan/atau penguatan lembaga UPKM, setiap lembaga tersebut akan mendapatkan bantuan stimulan peralatan kerja, sesuai dengan ketersediaan anggaran.

4.3. Status dana

Program RSDK, pada dasarnya tidak diberikan dalam bentuk dana (uang) tetapi dalam bentuk kegiatan dan barang, seperti kegiatan penguatan UPKM yang disertai dengan stimulan peralatan kerja dan kegiatan pelatihan keterampilan yang disertai dengan stimulan peralatan kerja. Pada kegiatan perbaikan rumah, bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada UPKM berupa pekerjaan perbaikan rumah, dan untuk selanjutnya guna keberlanjutan program RSDK dan hasilnya dapat dinikmati oleh keluarga miskin lainnya maka UPKM mengelola dan mengembangkan potensi dana yang diperoleh dari masyarakat penerima perbaikan rumah (seperti pengguliran dan pemanfaatan dana untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi keluarga miskin). UPKM membuat ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan dana masyarakat tersebut dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin.

5. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Program RSDK terdiri dari :

- a. temu informasi pengurus UPKM
Kegiatan temu informasi pengurus UPKM Program RSDK pada tingkat kota, dimaksudkan untuk ajang tukar menukar pengalaman dan mengkreasikan pengembangan kegiatan pelaksanaan program, dan sekaligus untuk mendapatkan masukan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan program
- b. sosialisasi program RSDK tingkat kota
Kegiatan sosialisasi program RSDK pada tingkat kota, dimaksudkan untuk menyebarluaskan pelaksanaan program pada tingkat kota, khususnya pada institusi yang terkait program dan sekaligus untuk mendapatkan masukan guna memperlancar pelaksanaan program di lapangan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada awal pelaksanaan program RSDK sebelum pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan.

- c. sosialisasi program RSDK tingkat Kelurahan
Kegiatan sosialisasi program RSDK pada tingkat Kelurahan, dimaksudkan untuk menyebarluaskan skema pelaksanaan program kepada pemangku kepentingan tingkat kelurahan, sekaligus untuk mendapatkan masukan guna memperlancar pelaksanaan program di lapangan. Dalam hal ini pemangku kepentingan tersebut adalah Lurah, LKMK, PKK Kelurahan, para ketua RW dan tokoh masyarakat. Kegiatan pengenalan dilaksanakan pada awal pelaksanaan program RSDK di tingkat Kelurahan.
- d. penyiapan UPKM
Kegiatan penyiapan UPKM yang berupa kegiatan pembentukan atau penguatan kelembagaan UPKM program RSDK, dimaksudkan untuk membentuk dan memperkuat lembaga pelaksana program di tingkat Kelurahan sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program di lapangan. Kegiatan pembentukan lembaga UPKM dilaksanakan pada awal pelaksanaan program RSDK sebelum pelaksanaan kegiatan teknis operasional selanjutnya.
- e. lokakarya pembekalan UPKM
Kegiatan pembekalan UPKM yang berupa Kegiatan lokakarya kelembagaan UPKM program RSDK, dimaksudkan untuk membekali kemampuan teknis dan manajemen sehingga dapat memperlancar pelaksanaan program di lapangan dan mengembangkannya secara mandiri. Pembekalan UPKM dapat pula dilakukan secara informal maupun formal guna peningkatan kapasitas UPKM sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tugas dan perannya.
- f. pemenuhan sarana kebutuhan UPKM
Kegiatan penyiapan alat kerja UPKM dimaksudkan untuk memberikan kelancaran bagi UPKM dalam melaksanakan program RSDK pada tingkat Kelurahan sehingga aktivitas UPKM dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan penyiapan alat kerja UPKM dilaksanakan setelah dikeluarkannya Keputusan Lurah tentang Pengurus UPKM.
- g. Verifikasi Usulan Musrenbang
Kegiatan verifikasi data usulan musrenbang dimaksudkan untuk memastikan kembali akurasi data-data yang diusulkan melalui musrenbang tahun sebelumnya, sebagai bagian dari sasaran penerima program RSDK.
- h. Survey sasaran program
Survey sasaran program adalah survey lapangan untuk menentukan sasaran penerima program RSDK. Kegiatan survey verifikasi dilaksanakan setelah pembentukan UPKM dan sebelum dilaksanakannya pertemuan penyusunan KRKK.
- i. pembuatan KRKK
Kegiatan musyawarah penyusunan KRKK, dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja sebagai dasar realisasi pelaksanaan kegiatan program RSDK yang memuat daftar calon penerima program, baik kegiatan pelatihan maupun perbaikan rumah. Kegiatan musyawarah penyusunan KRKK dilaksanakan setelah didapatkan data konkrit tentang sasaran calon penerima program (hasil survey).

Usulan yang diajukan oleh warga melalui ketua RW dimusyawarahkan dengan referensi data hasil verifikasi yang dilakukan oleh UPKM. Musyawarah tersebut bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama tentang rencana realisasi program untuk keluarga miskin yang terpilih.

Kegiatan pengesahan dokumen KRKK, dimaksudkan untuk memberikan legalitas usulan UPKM yang nantinya digunakan sebagai dasar realisasi program RSDK. Kegiatan pengesahan dilakukan setelah tercapai kesepakatan tentang KRKK pada musyawarah penyusunan KRKK.

- j. persiapan pelaksanaan kegiatan
Kegiatan pengajuan usulan realisasi kegiatan dilampiri dokumen KRKK yang diajukan oleh UPKM kepada Dinas, dimaksudkan sebagai langkah inisiatif dan mekanis UPKM untuk menindaklanjuti rumusan KRKK agar rencana kegiatan RSDK dapat segera direalisasikan. Kegiatan pengajuan realisasi kegiatan dilaksanakan setelah dokumen KRKK mendapatkan pengesahan.

Kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan pelatihan dan kegiatan perbaikan rumah, dimaksudkan agar kedua kegiatan tersebut dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan teknis maupun non teknis.

- k. pelatihan keterampilan usaha
Kegiatan pelatihan keterampilan usaha dilaksanakan secara bersama untuk semua anggota KUBE di Kelurahan, yang namanya tercantum pada dokumen KRKK.
Beberapa materi yang diberikan pada pelaksanaan kegiatan tersebut adalah latihan keterampilan dan wawasan usaha.
- l. perbaikan lingkungan dan bangunan rumah tidak layak huni
Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni, secara teknis dilaksanakan sesuai dengan usulan keluarga miskin, baik obyek maupun bahannya seperti untuk perbaikan atap, dinding, lantai atau komponen bangunan lainnya.

Pekerjaan perbaikan tersebut, dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat, dalam hal ini adalah UPKM yang dilakukan secara swakelola yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketentuan dan bentuk partisipasi masyarakat setempat harus tertuang dalam kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penanggungjawab kelompok masyarakat (UPKM).

- m. lokakarya pembekalan keberlanjutan program oleh UPKM
Kegiatan Lokakarya Pembekalan UPKM pada tingkat kota, dimaksudkan untuk memberikan pembekalan tentang keberlanjutan pelaksanaan program pada institusi pelaksana program/UPKM, sekaligus untuk mendapatkan masukan guna memperlancar pelaksanaan keberlanjutan program di lapangan. Kegiatan pembekalan dilaksanakan pada akhir waktu pelaksanaan program RSDK dan sebelum dilakukan kegiatan persiapan pengguliran kegiatan atau dana.

Persiapan pengguliran merupakan langkah awal mewujudkan komitmen, bahwa program RSDK akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh keluarga miskin lainnya secara bergulir. Kegiatan yang harus dilakukan oleh UPKM dalam persiapan pengguliran pada dasarnya adalah melaksanakan Musyawarah antara UPKM dengan pemangku kepentingan ditingkat Kelurahan untuk pembuatan daftar calon penerima kegiatan/dana selanjutnya. Dalam hal ini pemangku kepentingan tersebut adalah Lurah, LKMK, PKK Kelurahan, para ketua RW dan pengurus UPKM.

- n. lokakarya pertanggungjawaban UPKM
Kegiatan Lokakarya pertanggungjawaban UPKM pada tingkat kota, dimaksudkan untuk menerima laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing UPKM kepada Dinas Sosial.

6. ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM

6.1. Pola Pengelolaan program

Pengelolaan program RSDK, pada awal pelaksanaannya dilakukan dengan pembimbingan dan pendampingan kepada warga sasaran oleh Dinas Sosial yang dibantu oleh Tim pendampingan, baik secara teknis maupun administrasi. Bersamaan dengan itu dilakukan penyiapan dan pembinaan terhadap lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yaitu UPKM yang nantinya menjalankan program secara mandiri dan berkelanjutan.

6.2. Penanggungjawab program

Penanggungjawab pelaksanaan Program RSDK adalah Kepala Dinas Sosial.

6.3. Koordinasi pengelolaan program antar SKPD

Dalam hal keterpaduan program penanganan masalah kesejahteraan sosial, pelaksanaan Program RSDK Kota Surabaya dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan SKPD yang terkait.

6.4. Kelembagaan UPKM

UPKM dengan personil sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari unsur sebagai berikut :

- a. unsur perempuan sebanyak 2 (dua) orang;
- b. unsur tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
- c. unsur keluarga miskin sebanyak 2 (dua) orang;
- d. unsur warga lainnya sebanyak 1 (satu) orang (yang mampu menangani pembukuan keuangan).

Struktur pengurus UPKM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, yang semuanya merangkap sebagai anggota bersama ketiga orang lainnya. Keenam orang tersebut harus penduduk setempat dan memiliki KTP dengan alamat dilokasi Kelurahan setempat. Pada pelaksanaan tugasnya, UPKM perlu berkoordinasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya di wilayah kelurahan setempat. Untuk meningkatkan efektifitas dan kapasitas UPKM dalam pembinaan keluarga miskin, baik pada aspek sosial, ekonomi maupun fisik, UPKM sebagai kelompok masyarakat dapat melakukan perikatan kerjasama atau kontrak kerja dengan instansi pemerintah atau swasta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.5. Dukungan instansi pemerintah lainnya

Dalam upaya untuk mengefektifkan pembinaan usaha masyarakat miskin tidak cukup hanya bertumpu pada dukungan kebijakan dan stimulan dana dari Pemerintah Daerah. Keberadaan dan potensi kepedulian dari Instansi Pemerintah lainnya, harus semaksimal mungkin terakomodasikan secara fungsional guna memberikan semacam jaminan agar Program RSDK dapat berkelanjutan dengan esensi upaya yang dikerjakan oleh masyarakat miskin dapat tetap berjalan dan berkembang dengan norma-norma usaha yang semakin profesional.

6.6. Dukungan swasta

Untuk memaksimalkan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial melalui Program RSDK, perlu diupayakan secara terus menerus, muncul dan meningkatnya kepedulian atau keterlibatan swasta dalam mendukung Program RSDK. Keterlibatan tersebut, diantaranya dapat berupa memberikan pelatihan sesuai minat masyarakat miskin, memberikan tambahan stimulan dana, memberikan kesempatan untuk magang usaha, memberikan transfer pengetahuan dan ketrampilan atau menjadi mitra usaha.

6.7. Dukungan masyarakat umum

Untuk memaksimalkan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial melalui Program RSDK, perlu diupayakan secara terus menerus, muncul dan meningkatnya kepedulian atau keterlibatan masyarakat umum, baik secara individu ataupun kelompok dalam mendukung Program RSDK.

7. PENDAMPINGAN UNTUK MASYARAKAT

7.1. Tujuan pendampingan

Tujuan kegiatan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat pada pelaksanaan Program RSDK adalah agar pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan skema program dan menumbuhkan kepedulian, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat pada umumnya dan keluarga miskin pada khususnya dalam menjalankan program.

7.2. Pola pendampingan

Pendampingan dalam rangka implementasi Program RSDK dibuat dengan pola, yaitu :

- a. pendampingan untuk skala kota, dilakukan oleh konsultan program;
- b. pendampingan untuk masyarakat (sasaran program) di tingkat Kelurahan dalam menjalankan dan memanfaatkan Program RSDK, dilakukan oleh tim pendampingan.

Pada tingkat Kota, pendampingan diarahkan untuk membantu kesiapan teknis pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RSDK.

Pada tingkat Kelurahan atau masyarakat, pendampingan diarahkan untuk membantu keluarga miskin dan UPKM, dalam melaksanakan kegiatan Program RSDK.

Kegiatan Pendampingan, pada dasarnya diberikan pada tahun awal pelaksanaan Program RSDK dan pada tahun-tahun berikutnya masyarakat melanjutkan dan menjalankan kegiatan program secara mandiri.

7.3. Tugas pendampingan

Tugas pendampingan dalam Program RSDK adalah:

- a. membantu survey dan validasi sasaran program;
- b. memfasilitasi penyiapan UPKM;
- c. mendampingi masyarakat dalam penyiapan dan pelaksanaan pembuatan KRKK;
- d. memfasilitasi kegiatan pelatihan;

- e. mendampingi dan memberikan advisory pada keluarga miskin tentang masalah dan potensinya;
- f. mendampingi dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah;
- g. mendampingi dalam penyiapan langkah-langkah keberlanjutan pelaksanaan program oleh masyarakat.

8. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Program RSDK, ditekankan pada:

- a. tercapainya kelompok sasaran (keluarga miskin);
- b. terlaksananya rencana kegiatan sesuai dengan skema program;
- c. terbentuknya UPKM dan kesiapannya menjalankan kegiatan;
- d. diperbaikinya bangunan rumah tinggal keluarga miskin sasaran;
- e. kesiapan rumah untuk dimanfaatkan bagi kegiatan sosial ekonomi keluarga miskin.

Selain hal tersebut diatas, perlu pula diperhatikan beberapa kondisi pendukung yang secara indikatif dapat mengembangkan implementasi program RSDK, yaitu sebagai berikut :

- a. peran serta swasta;
- b. peran serta instansi Pemerintah;
- c. peran serta masyarakat (kelompok atau individu);
- d. perkembangan usaha keluarga miskin sasaran;
- e. kendala utama yang dihadapi oleh keluarga miskin secara individu atau kelompok dalam menjalankan kegiatan program dan potensi utama yang dimiliki keluarga miskin secara individu atau kelompok.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004